

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1 Efektivitas Kegiatan Pembangunan Permukiman Khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin

Kegiatan pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) di Kabupaten Merangin dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari Kementerian Sosial. kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat Suku Anak Dalam melalui pembangunan permukiman khusus dan fasilitas penunjang. Sejak tahun 2017, telah dibangun 113 unit rumah untuk 5 kelompok Suku Anak Dalam di 3 kecamatan di Kabupaten Merangin.

Namun, evaluasi program menunjukkan bahwa kegiatan ini belum efektif dalam mencapai tujuannya. Masih banyak indikator yang belum terpenuhi, seperti ketepatan waktu, tercapainya tujuan dan perubahan. Masyarakat Suku Anak Dalam masih menghadapi kesulitan dalam beradaptasi dengan kehidupan baru di permukiman khusus. Mereka masih melakukan tradisi melangun (berpindah-pindah) ke hutan dan belum memiliki keterampilan yang cukup untuk meningkatkan pendapatan. Oleh karena itu, kegiatan permukiman masyarakat Suku Anak Dalam perlu dievaluasi dan diperbaiki untuk meningkatkan efektivitasnya.

5.1.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Dalam Kegiatan Pembangunan Permukiman Khusus Suku Anak Dalam

Faktor pendorong meliputi :

1. Komunikasi para pelaksana berjalan dengan baik
2. Koordinasi para pelaksana kebijakan berjalan dengan baik bahkan pada tingkat Suku Anak Dalam
3. Respon implementor terhadap kebijakan pembangunan permukiman sangat positif
4. Terus melakukan pengawasan dan pembenahan terhadap pelaksanaan program
5. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pembangunan permukiman khusus dan pemberdayaan Suku Anak Dalam melibatkan beberapa tingkat pemerintahan dan lembaga yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan

Faktor penghambat meliputi :

1. Sumber finansial menjadi faktor penghambat pelaksanaan kebijakan permukiman khusus dan pemberdayaan Suku Anak Dalam secara maksimal karena pemerintah daerah Kabupaten Merangin hanya mengandalkan anggaran dari Kementerian Sosial untuk melakukan pembangunan permukiman khusus dan pemberdayaan komunitas Adat Terpencil Suku Anak Dalam

2. Ketidakpastian ketersediaan anggaran
3. Keterbatasan sumber daya manusia yang memahami budaya Suku Anak Dalam
4. Ketergantungan pada pemerintah pusat
5. Keterbatasan sumber daya manusia
6. Ketergantungan pada berbagai pihak dari pemerintah pusat, dinas terkait, LSM bahkan organisasi masyarakat dapat menjadi kompleks dan memakan waktu

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan oleh penulis kaitannya dengan kegiatan pembangunan permukiman khusus Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin

- a. Sumber finansial yang mengandalkan pemerintah pusat

Pemerintah perlu memastikan ketersediaan anggaran yang cukup dan tepat waktu untuk mendukung program pembangunan permukiman khusus dan pemberdayaan Suku Anak Dalam. Hal ini dapat dilakukan dengan mempercepat proses pengajuan dan pencairan dana dari Kementerian Sosial. Kurangnya akses ke fasilitas pendidikan dan kesehatan

- b. Ketidakpastian ketersediaan anggaran

Pemerintah daerah perlu mencari sumber pendanaan alternatif seperti kerja sama dengan lembaga swasta atau organisasi non-pemerintah, untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pusat.

c. Keterbatasan sumber daya manusia

Pemerintah Kabupaten Merangin perlu untuk melakukan kegiatan pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM di tingkat daerah karena diperlukan untuk mendukung implementasi kebijakan yang lebih efektif khususnya terhadap Suku Anak Dalam. Perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan bahwa sumber daya yang tersedia digunakan secara efisien dan efektif. Dengan dukungan sumber daya yang memadai, baik manusia maupun finansial, program pembangunan permukiman khusus dan pemberdayaan Suku Anak Dalam di Kabupaten Merangin dapat mencapai tujuan dan sasaran secara lebih optimal.